

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

Anuar Sadat

Universitas Islam Sumatera Utara
Email : anuar.sadat@fisip.uisu.ac.id

Abstrak

Sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) ini diharapkan akan memberikan peningkatan efektifitas dan efisiensi di bidang pengolahan, penyimpanan, penyajian dan rekap informasi yang terkait dengan kepegawaian seperti biodata personil, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, baperjakat. Masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu proses administrasi dan dokumentasi kinerja pegawai dilakukan pencatatan di buku besar ataupun penyimpanan berkas didukung teknologi dan informasi. Karena data pegawai dan aktivitas kerja pegawai harus disimpan dengan baik dan benar serta aman. Untuk itu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berfungsi dalam mengelola data mulai dari :pengajuan cuti, mutasi, kenaikan pangkat, maupun pengajuan pensiun pegawai. Menjadi permasalahan yaitu data dan dokumen kepegawaian senantiasa sebaiknya didukung dengan pemanfaatan Informasi dan teknologi yang handal dan berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dengan memanfaatkan informan kunci. Analisis data menggunakan kualitatif yang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara atau wawancara kepada informan kunci (kepala dinas, sekretaris, kepala bagian dan bidang serta pegawai) untuk memperoleh data-data yang diperlukan tentang bagaimana implementasi Simpeg pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil Penelitian terhadap Implementasi Simpeg pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara diukur dengan menggunakan dua dimensi yakni sumber daya manusia dan pelaksanaan prosedur. Implementasi Simpeg pada Dinas Kesehatan telah berjalan dengan baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan IT dan Sumber daya tenaga ahlinya, hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dan observasi penelitian.

Kata-Kata Kunci: *Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*

I. Pendahuluan

Perlunya penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah untuk memantapkan administrasi kepegawaian sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel, dan *up to date*. Dengan mengkonversi data manual menjadi data digital ke dalam suatu database dan aplikasi terkomputersisasi dalam satu payung system yang disebut system informasi kepegawaian berbasis website yang ditujukan untuk penggunaan secara mobil dan flexibel.

Tanpa sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) maka tidak akan memberikan efektifitas dan efisiensi di bidang pengolahan, penyimpanan, penyajian dan rekap informasi yang terkait dengan kepegawaian (biodata personil, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, baperjakat, dan lain-lain).

Di era globalisasi saat ini, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan konsekuensi bagi para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) untuk pengembangan solusi akan sangat ditentukan oleh peranan sistem informasi (SI). Keberhasilan suatu informasi dalam mendukung kegiatan organisasi tergantung pada tiga factor utama, yaitu : keserasian data dan mutu,

pengorganisasian data, dan tata cara penggunaannya (Cook, 1977:37)

Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. Konsep good governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian. Penerapan kebijakan e-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas saat ini, membuka peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Teknologi yang dimanfaatkan dengan baik dalam pengelolaan informasi pada suatu organisasi dapat mengurangi rantai proses kerja melalui penghapusan secara besar-besaran beberapa tahap rantai kerja yang

tidak memberikan nilai tambah atau mengurangi tahap proses kerja inilah yang menjadi dasar dalam organisasi untuk menerapkan system informasi manajemen kepegawaian (Simpeg).

Penerapan kebijakan e-government dalam hal ini sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. kebijakan penerapan e-government terkait dengan Simpeg harus ditunjang dengan infra struktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait (Indrajit, 2004).

Besarnya cakupan pelayanan, kompleksitas tugas dan tantangan teknologi ini mendasari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, dimana pokok-pokok pelaksanaannya telah tercantum dalam Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 125 tahun 2017 tentang Sistem Informasi manajemen Kepegawaian dalam Negeri

Perkembangan tugas pokok di lingkungan organisasi pemerintah menuntut suatu organisasi pemerintah untuk menetapkan suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Salah satunya adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dalam teori manajemen disebutkan bahwa persoalan administrasi pegawai merupakan setengah bagian dari manajemen kepegawaian. Mengingat pentingnya pengelolaan administrasi pegawai tersebut, maka pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang merupakan salah satu prioritas dalam tahapan pengembangan *e-government* di Indonesia pada umumnya.

Fenomena dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa implikasi dari Permendagri terkait dengan Sistem Informasi manajemen Kepegawaian masih terus harus diperhatikan dan diawasi dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Deskripsi Implementasi Sistem Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

II. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi

merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (1979:914) kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari kata “plere.

Maknanya :

- Pertama : to implement dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat)
- Kedua : to implement dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu
- Ketiga : to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat

Berdasarkan teori di atas maka pada hakikatnya Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan individu ataupun satuan-satuan pemerintah bersama dengan pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan pada suatu waktu demi mencapai tujuan tertentu. Pencapaian tujuan akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap penyelesaian masalah dalam suatu organisasi pemerintah dan publik. Karenanya untuk mendukung menyelesaikan permasalahan yang ada maka perlu adanya identifikasi yang tepat dan benar, yaitu masalah yang diidentifikasi itu tidak sekedar benar dalam arti plausible atau masuk akal, tetapi juga dapat ditangani (actionable) dilihat dari berbagai sarana dan prasarana yang ada dan mungkin dapat diusahakan dan diadakan.

2. Sistem Informasi Manajemen

W. Kumorotomo dan S.A Margono (2004: 7) menyatakan bahwa pada umumnya apabila orang membicarakan tentang sistem informasi manajemen yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjang tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut.

Wing Wahyu Winarno (2006: 2) menyimpulkan bahwa pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencari data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Komponen sistem informasi yang paling utama adalah teknologi komunikasi, teknologi komputasi, dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi digunakan untuk mengirimkan data dari satu tempat atau alat ke tempat atau alat yang lain. Teknologi komputasi adalah berbagai perangkat yang digunakan untuk mengolah data. Sedangkan teknologi informasi adalah berbagai metode untuk menyajikan berbagai bentuk informasi ke berbagai pihak yang memerlukannya.

Secara sederhana, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah pengelolaan informasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dimana SIM saat ini menggunakan komputer untuk mempercepat pengolahan dan persebaran informasi atau biasa disebut Computer Based Management Information System (CBIS).

Suatu Sistem informasi manajemen yang berbasis komputer terdiri dari: manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten (Parker dalam W. Kumorotomo dan S.A. Margono, 2004: 16).

3. *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)*

Permendagri Nomor 125 tahun 2017 mendefinisikan sistem informasi manajemen kepegawaian adalah rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam melaksanakan manajemen kepegawaian.

Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (software) yang dipergunakan untuk mengelola data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan menyeluruh. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa: “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian” (Keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda).

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif, Muhamad ali (1982:120) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah dengan cara pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif.

Analisis data memakai pendekatan kualitatif, yang menguraikan data secara baik dan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih dan efektif sesuai dengan topic kajian sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis berjalan untuk menggali secara mendalam dan selektif data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang telah ditentukan. Hal ini menjadi dasar penulis untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena Implementasi atau pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan key informan (dari Kasubag dan kabid Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara), sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya data sekunder didapatkan dari literature atau dokumen berupa hasil penelitian dan artikel terkait dengan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian, buku-buku serta peraturan tentang sistem informasi manajemen kepegawaian.

IV. Hasil Penelitian Dan Analisis

Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada hakikatnya adalah sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah Aceh Tenggara terkait pada kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Dimana saat ini (Tahun 2018) jumlah ASN dan Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 57 orang. Untuk menghasilkan informasi kepegawaian guna menjadi acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen kepegawaian, dinas kesehatan menjalankan sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Aturan yang mendasari implementasi SIMPEG ini adalah permendagri Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 125 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementrian dalam Negeri.

Implikasi dari implementas Permendagri nomor 17 tahun 2000 dan Permendagri nomor 125 tahun 2017, yaitu pada terwujudnyasuatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen aparatur sipil Negara pada dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pelaksanaan SIMPEG pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan SIMPEG

Kesiapan SDM yang akan melaksanakan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada dinas kesehatan kabupaten Aceh Tenggara sudah baik tetapi masih tetap perlu pelatihan dan pengembangan guna mengikuti dan mengantisipasi perkembangan teknologi yang dipakai. Karenanya Pelatihan dan pendidikan tetap akan dilaksanakan secara terencana.

Spesialisasi Pembagian Kerja

Terdapat lima golongan spesialis informasi, yaitu analis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programmer, dan operator komputer. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan, penggunaan teknologi pada SIMPEG telah sesuai dengan kualifikasi sumber daya manusia yang ada. Ketersediaan pegawai dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi.

Tabel 1. Jabatan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Pengelola SIMPEG

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan
1.	Analisis Sistem Informasi	1	Sarjana Teknik Informatika
2.	Pengelola Data Base	1	D III Sistem Informasi
3.	Administrator jaringan	1	D III Teknik Informatika
4.	Operator Komputer :	3	D III Sistem Informasi

Pelaksanaan Prosedur Kerja

Pelaksanaan prosedur kerja dalam pelaksanaan SIMPEG di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan pengumpulan data pegawai sesuai dengan standar baku prosedur pelaksanaan kerja. Pelaksanaan SIMPEG secara keseluruhan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara telah memiliki ketentuan prosedur kerja tertulis yang diatur dengan ketetapan.

Pelaksanaan Alur Kerja SIMPEG

Dinas Kesehatan Aceh Tenggara melaksanakan alur kerja sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang meliputi Sub Sistem Input, Sub Sistem Proses, dan Sub Sistem Output. Keberadaan SIMPEG di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara tidak lepas dari program pengisian Formulir Isian Pegawai (FIP). Data yang digunakan sebagai masukan database SIMPEG adalah seluruh data Pegawai yang tercatat didalam Formulir Isian Pegawai (FIP) yang diedarkan ke seluruh pegawai.

Dari seluruh hasil wawancara, dapat diketahui pula bahwa bentuk FIP sesuai dengan form yang telah ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Data-data yang ada di dalam Formulir Isian Pegawai (FIP) tersebut menjadi acuan dalam pemrograman SIMPEG.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari artikel ini adalah merujuk pada Permendagri Nomor 17 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 125 tahun 2017

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
Pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian saat ini ternyata telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi teknologi yang digunakan dalam program SIMPEG maupun pada kualitas data. Pengembangan SIMPEG telah dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan yang ada. Perubahan yang merupakan progress terbesar adalah validitas data SIMPEG di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara karena selain penagaan secara otomatis di dalam program SIMPEG, dinas kesehatan juga telah melakukan pemutakhiran data (pembaruan data). Di dalam konteks pelaksanaan sistem ini, penulis melihat pelaksanaan berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelaksanaan Prosedur, Pelaksanaan alur kerja sistem (subsistem input, subsistem proses dan subsistem output). Disisi sumber daya manusia (SDM), sebenarnya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara telah memiliki SDM dengan kualifikasi yang baik dilihat dari latar belakang pendidikannya, perencanaan SDM-nya pun sudah baik, terbukti dengan adanya spesialisasi pegawai yang sesuai dengan standard pelaksanaan sistem informasi. Alur kerja SIMPEG telah berjalan sesuai dengan alur yang harus dijalani dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM), yakni mencakup sub sistem input, sub sistem proses, dan sub sistem output. Di dalam proses pelaksanaan SIMPEG itu sendiri, pengumpulan data oleh Kepala bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dari unit-unit Satuan Kerja yang ada telah dilaksanakan secara komputerisasi.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Simpeg
Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SIMPEG antara lain masih kurangnya keterlibatan dan tingkat partisipasi pemakai terkait pembiasaan pegawai pada sistem baru. Hambatan lain yang terjadi yakni masih kurangnya pelatihan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan pelaksanaan SIMPEG. Selain itu, tidak ada prosedur kerja (SOP) terkait pengumpulan input data dapat menghambat pelaksanaan input data. Keberadaan prosedur kerja penting untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melaksanakan kegiatan.
Kemudian hambatan yang timbul dalam pelaksanaan alur kerja sistem salah satunya juga muncul karena kurangnya konsistensi pemakai dengan sistem informasi yang baru, disamping

masalah kuantitas pegawai yang masih terdapat rangkap jabatan di bidang-bidang tertentu. Dalam pelaksanaan alur kerja sistem ini juga terdapat hambatan yang disebabkan karena ketimpangan kondisi hardware, khususnya komputer dan printer yang ada di bidang-bidang yang menghambat pelaksanaan tugas.

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan SIMPEG dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena telah memberikan kontribusi yang besar bagi pelaksanaan fungsi kepegawaian untuk melaksanakan proses manajemen Kepegawaian pada seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, pelaksanaan SIMPEG ini dapat dikatakan belum optimal, karena masih mengalami beberapa hambatan dan masalah yang disebabkan oleh beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Bagian Kepegawaian pada dinas Kesehatan kabupaten Aceh Tenggara sebenarnya memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan SIMPEG menjadi jembatan menuju reformasi kepegawaian.

Daftar Pustaka

- [1] Arikunto, Suharsimi, 1996, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Amsyah, Zulkifli. 2001, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*. Bandung, CV.Pustaka Setia, 2014
- [4] Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alvabeta.
- [5] Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta.
- [6] Budi Winarno, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta.
- [7] Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali, Jakarta.
- [8] Davis, Gordon. B. 1974. *Management Information System Conceptual Foundations, Structure and Development*. New York: Mc.Graw Hill.